



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jampangkulon, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah, yang diajukan oleh:

Hendar bin Supendi, Sukabumi 03 Juli 1968 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Cisuru RT.004 RW. 002 Desa Padajaya Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Imas binti Abas, Sukabumi 02 Januari 1974 (umur 43 tahun), agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Cisuru RT.004 RW. 002 Desa Padajaya Kecamatan Jampangkulon kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Cbd mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 5 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juni 1993 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abas dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jaya Laksana dan Lili Udawan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Linda Sulastri, Sukabumi 20 Maret 1994
 - b. Asep Rahayu, Sukabumi 01 Desember 2004;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada

Halaman 2 dari 5 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Hendar bin Supendi) dengan Pemohon II (Imas binti Abas);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Hendar bin Supendi) dengan Pemohon II (Imas binti Abas) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara relaas Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 17 Maret 2017 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 3 dari 5 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II aquo harus dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon, gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag. dan Drs. Mustofa Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H.

*Halaman 4 dari 5 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Drs. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 40.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Palabuhanratu, 29 Maret 2017

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama cibadak

Drs. E. Arifudin

Halaman 5 dari 5 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Cbd



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H

Halaman 6 dari 5 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 21/Pdt.P/2017/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)